

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Strategi Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa strategi pengembangan pertanian organik di Kota Batu yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu belum mampu mencapai target yang diterapkan. Hal tersebut berdasarkan sebagai berikut:

1. Strategi Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu:

a) Penetapan dan Pengembangan Kawasan Pertanian Organik

Pengembangan kawasan pertanian organik hingga tahun 2017 tidak dapat berjalan sesuai target. Dari 8 kawasan yang diteliti, 4 kawasan memenuhi kriteria lahan organik dan 4 kawasan lain tidak sesuai.

b) Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Budidaya Pertanian Organik

Kebutuhan penunjang budidaya organik yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu terdiri dari bibit organik, pupuk organik, agen hayati, alat dan mesin pertanian, Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi. Perima manfaat adalah kelompok tani atau gapoktan, kurangnya pengendalian dan evaluasi dari komisi pengguna anggaran menyebabkan distribusi bantuan di tingkat kelompok tani kurang transparan.

c) Pengembangan Demplot Pertanian Organik

Demplot sudah dikembangkan sesuai kriteria lahan pertanian organik tetapi fungsi demplot sebagai sarana sosialisasi, inovasi teknologi dan sarana memecahkan masalah dilapangan kurang maksimal.

d) Sosialisasi dan Pendampingan Organik

Sosialisasi dilakukan di awal pembentukan kawasan pertanian organik, pendampingan dilakukan oleh petugas penyuluh lapang sejak masa konversi ke organik hingga masa panen. Pendampingan yang diberikan dalam bentuk sekolah lapang, pelatihan dan penyuluhan lebih mengarah pada teknis pertanian organik dan tidak mengarah bagaimana menciptakan kemandirian petani serta bagaimana jalur memasarkan produk organik.

e) Pendampingan dan Fasilitasi Proses Sertifikasi Lahan dan Produk Organik

Pendampingan dan fasilitasi dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan bantuan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Dinas di tingkat kota bertindak sebagai tim Sistem Kendali Internal yang bertugas melakukan *pra assessment* dan menerbitkan dokumen ICS (*Internal Control System*). Sertifikasi harus berbasis kelompok dan biaya sertifikasi ditanggung oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Penilaian dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Lembaga Sertifikasi Organik (LSO).

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Pertanian Organik

Di Kota Batu:

a) Faktor pendukung internal:

- 1) Dukungan pemerintah Kota Batu
- 2) Dukungan sumberdaya manusia
- 3) Dukungan sumberdaya alam.
- 4) Regulasi atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pertanian organik
- 5) Wisatawan dari luar Kota Batu yang berminat terhadap produk organik
- 6) Terdapat Lembaga Sertifikasi Organik
- 7) Dukungan dana dari luar Kota Batu yaitu APBD I dan APBN

b) Faktor penghambat:

- 1) Permasalahan sistem usaha pra produksi
 - a) Pembuatan *roadmap* pertanian organik terlambat
 - b) Petani yang sudah melakukan budidaya organik tidak konsisten
 - c) Sistem distribusi bantuan ditingkat kelompok tani kurang transparan
 - d) Proses lelang gagal menyebabkan bantuan tidak dapat diberikan tepat waktu.
- 2) Permasalahan produksi
 - a) Bibit organik belum cukup tersedia
 - b) Persediaan pupuk organik di Batu kurang
 - c) Hasil produk organik terbatas

- 3) Permasalahan sistem pasca produksi
 - a) Belum tersedia sub terminal
 - b) Sistem pemasaran hasil pertanian organik belum jelas
 - c) Pengetahuan petani mengenai teknis jalur pemasaran kurang
 - d) Kesadaran masyarakat Kota Batu terhadap produk pangan sehat kurang
 - e) Tidak ada beda antara sistem pemasaran produk konvensional dengan organik

B. Saran

Dilihat dari strategi yang diterapkan untuk pengembangan pertanian organik di Kota Batu, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan pengembangan kawasan pertanian organik sebaiknya bukan ditargetkan berapa banyak ditetapkan kawasan pertanian organik. Kawasan pertanian organik ditargetkan memenuhi kriteria lahan pertanian organik, luas yang ditetapkan tercapai dan membangun komitmen petani agar praktek pertanian organik dapat dilakukan secara berkelanjutan.
- 2) Pemenuhan kebutuhan penunjang budidaya pertanian organik memerlukan capaian target khusus sampai mana tingkat keberhasilan suatu kawasan. Perlu ada target sampai tingkat mana bantuan diberikan kepada petani agar tidak menimbulkan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Bantuan dalam bentuk alat dan mesin pertanian tidak perlu semua kawasan diberikan tetapi bergiliran tergantung sampai mana

tingkat keberhasilan setiap kawasan. Alokasi dana untuk alsintan tiap kawasan bisa dialihkan pada pembuatan kandang komunal berikut ternak guna memproduksi pupuk organik.

- 3) Fungsi demplot pertanian organik kurang maksimal karena hanya sebagai percontohan lahan pertanian organik dan belum bisa menyelesaikan masalah umum yang dihadapi. Perlu koordinasi dan sinergi peneliti untuk menghasilkan inovasi dan teknologi baru di bidang pertanian termasuk rekayasa sosial dan kelembagaan. Pusat penelitian harus terkoordinasi dengan institusi penyuluhan dalam rangka distribusi dan implementasi teknologi yang dihasilkan. Adopsi teknologi yang sudah berhasil di luar negeri juga bisa dilakukan guna mengatasi permasalahan *on farm* maupun kegiatan di hilir (pengolahan dan pemasaran).
- 4) Terkait masalah kelembagaan ditingkat kelompok tani perlu penataan kelembagaan dan asosiasi di bidang pertanian agar dapat berfungsi efektif. Harus ada kendali hukum untuk membina, mengawasi dan mengembangkan kelembagaan dan asosiasi pertanian.
- 5) Penguatan sistem penyuluhan penting dilakukan guna menciptakan petani yang mandiri dalam menerapkan pertanian organik. Penyerahan tanggung jawab penyuluhan kepada pemerintah kota membuat fungsi penyuluhan tidak efektif, perlu dirumuskan sampai mana kewenangan penyuluh. Fungsi Balai Penyuluhan Pertanian dikembangkan sebagai kios saprodi organik, pusat konsultasi petani, pusat percontohan

teknologi tepat guna, pusat pelayanan petani, pusat informasi pasar dan modal dan dikembangkan seperti puskesmas.

- 6) Berkaitan dengan jaringan pasar perlu dibangun sub terminal agribisnis khusus pertanian organik yang dikelola secara profesional. Jika di setiap kecamatan dibangun pasar-pasar pengumpul, dan ditingkat kota dibangun subterminal agribisnis selanjutnya di tingkat provinsi dibangun terminal agribisnis maka satu sama lain saling terkoordinasi. Kota Batu yang menjadikan pertanian organik sebagai *pilot project* perlu membangun showroom khusus produk pertanian organik atau perbaikan sistem agar ada beda produk organik dan konvensional di pasar lokal.